

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Rataan pendapatan petani perkebunan di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp 1.928.739 per bulan dan petani non perkebunan sebesar Rp 1.327.379. Kondisi ini juga memberikan gambaran bahwa petani perkebunan juga memperlihatkan pendapatan yang tinggi. Tentu saja ini terkait dengan kesejahteraan keluarga, terutama pemenuhan kebutuhan hidup. Jika dilihat masing-masing jenis usahatani memberikan gambaran bahwa petani kelapa sawit mempunyai tingkat pendapatan yang tinggi yakni rata-rata Rp 2.830.550, sedangkan petani kelapa hanya sebesar Rp 1.133.789. Perbandingan pendapatan antara petani kelapa sawit dengan petani kelapa sebesar 5:2. Artinya pendapatan petani kelapa sawit jauh lebih besar dibandingkan pendapatan petani kelapa di pedesaan.
2. Sebagian masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir sumber mata pencaharian dari kebun Kelapa, kecuali untuk wilayah Barat sebagian besar berusaha tani kelapa sawit. Mereka yang sumber mata pencaharian dari usahatani kelapa memperlihatkan tingkat pendapatan yang rendah (relatif miskin). Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 199.452 jiwa (31,94%). Dari jumlah 141.385 kepala keluarga terdapat sebanyak 46.235 (32,7%) keluarga miskin. Keluarga miskin ini sebagian besar adalah petani kelapa di pedesaan.
3. Di daerah pedesaan terutama di kawasan perkebunan kelapa jarang sekali ditemukan koperasi. Hal ini disebabkan karena tidak adanya ketertarikan masyarakat terhadap koperasi tersebut. Dari sisi lain juga diperoleh informasi di lapangan bahwa inisiatif dari pemuka masyarakat maupun pihak pemerintah sangat kurang sekali untuk mengembangkan koperasi di pedesaan. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh kuatnya pengaruh pedagang harian di pedesaan. Untuk ukuran desa ketersediaan barang harian (kebutuhan pokok) masyarakat sudah tersedia di kedai harian yang dimiliki

oleh para pedagang-pedagang (merangkap sebagai toke) di desa tersebut. Peran toke dalam menjajakan dagangannya sangat besar karena toke juga sebagai pembeli hasil kebun (kelapa, kopra, pinang, kakao dan lainnya).

4. Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Namun di daerah pedesaan koperasi belum merata di setiap desa atau di setiap kelompok-kelompok masyarakat pedesaan. Koperasi belum bisa memberikan bentuk pelayanan yang optimal kepada anggotanya, hal tersebut disebabkan oleh beberapa kelemahan, antara lain: 1) lemahnya kualitas sumberdaya manusia khususnya kualitas manajemen; 2) koperasi di pedesaan lebih banyak bergerak pada bidang usaha simpan pinjam bukan pada usaha produktif; 3) masih ditemukan koperasi tidak melibatkan anggota dalam aktifitasnya (koperasi dikendalikan oleh pemilik modal); 4) kegiatan koperasi tidak sesuai dengan kebutuhan anggota sehingga koperasi berjalan atas kehendak pengurus semata; 5) masih rendahnya partisipasi anggota karena anggota tidak merasakan manfaat sebagai anggota koperasi; 6) koperasi masih sebatas penghubung antara anggota dengan mitra kerja (khusus untuk koperasi petani perkebunan kelapa sawit); dan 7) adanya kegiatan koperasi yang memanfaatkan dukungan pemerintah terhadap keberadaan koperasi bagi kepentingan pribadi (sebagai usaha pribadi).
5. Secara khusus kelemahan koperasi di pedesaan antara lain: 1) budaya manajemen masih bersifat feodalistik paternalistik (pengawasan belum berfungsi); 2) pada penentuan kepengurusan dan manajemen koperasi masih dipengaruhi oleh rasa tenggang rasa sesama masyarakat bukan didasarkan pada kualitas kepemimpinan dan kewirausahaan; 3) anggota koperasi di pedesaan pada umumnya sangat heterogen, baik dari sisi budaya, pendidikan, maupun lingkungan sosial ekonominya; 3) usaha yang dilakukan tidak fokus, sehingga tingkat profitabilitas koperasi masih rendah; 4) masih rendahnya kualitas pelayanan koperasi terhadap anggota maupun non anggota; 5) masih lemahnya sistem informasi di tingkat koperasi, terutama informasi harga terhadap komoditas pertanian sehingga akses pasar produk pertanian dan produk lainnya masih relatif sempit; 6) belum

- berperannya koperasi sebagai penyalur sarana produksi pertanian di pedesaan dan sebagai penampung hasil produksi pertanian.
6. Hasil pengamatan di lapangan ditemukan beberapa faktor pendukung pembangunan ekonomi daerah melalui pengembangan koperasi, antara lain:
 - 1) potensi masyarakat; 2) pengusaha; 3) lembaga perkreditan; 4) instansi terkait; dan 5) koperasi sebagai badan usaha.
 7. Pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) melalui koperasi di daerah memiliki beberapa sasaran, yaitu: 1) menarik pembangunan di daerah; 2) menciptakan nilai tambah; 3) menciptakan lapangan pekerjaan; 4) meningkatkan penerimaan daerah; 5) memperbaiki pembagian pendapatan; dan (6) meningkatkan pengetahuan pengusaha melalui perubahan teknologi.

6.2 Saran

1. Selama menunggu masa panen (waktu tiga bulan) pada umumnya petani kelapa di pedesaan sangat tergantung kepada sang toke. Petani di pedesaan tidak mempunyai kekuatan untuk menjual kopronya kepada toke lain, hal tersebut disebabkan petani telah berutang (berupa uang tunai dan kebutuhan harian) kepada toke desa. Keadaan ini membuat petani kelapa di pedesaan tidak bisa keluar dari cengkraman toke di desa. Semuanya berdampak terhadap penekanan harga atau penentuan harga sepihak oleh pihak toke. Kalau ini masih berlanjut maka petani kelapa di pedesaan tidak akan terangkat dari kemiskinan yang berkelanjutan. Guna mengatasi semua masalah petani dipedesaan perlu kebijakan pemerintah, antara lain: 1) ada jaminan pasar bagi petani melalui koperasi; atau 2) disediakan subsidi harga bagi petani kepala. Subsidi harga jauh lebih baik dibandingkan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat pedesaan.
2. Guna mengatasi permasalahan petani di pedesaan, maka sangat diperlukan adanya koperasi di setiap desa atau setiap kawasan permukiman sebagai penyedia kebutuhan petani di pedesaan. Koperasi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada anggotanya (khususnya petani) berupa pembelian secara tunai hasil pertanian, penyediaan barang kebutuhan pokok masyarakat, penyediaan sarana produksi pertanian, dan alat mesin yang

- digunakan untuk berusahatani. Koperasi harus dipimpin oleh orang yang mengerti manajemen perkoperasian, sehingga koperasi dapat berkembang dengan baik sebagai tulang punggung ekonomi pedesaan.
3. Dalam pembangunan koperasi untuk percepatan ekonomi daerah, sangat perlu adanya kemitraan. Kemitraan yang dimaksud adalah dalam bentuk partisipasi dari semua unsur yang terkait untuk pengembangan koperasi. Pembangunan koperasi didasari oleh adanya potensi di daerah yang dapat mendukung berjalannya koperasi, antara lain: masyarakat, pengusaha (kecil dan menengah), industri rumah tangga, dan untuk daerah pedesaan adanya masyarakat petani. Dengan dasar kebutuhan bersama, potensi ini harus dikembangkan melalui koperasi dan menjadi anggota koperasi pada masing-masing jenis usaha atau kegiatannya. Koperasi dengan manajemen yang baik menjalin kerjasama dalam bentuk mitra kerja dengan lembaga keuangan dan perusahaan. Dari ketiga komponen mitra (koperasi, perusahaan, dan lembaga keuangan) perlu dukungan dari pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Pemerintah sifatnya disini hanya sebagai pemberian jasa berupa pembinaan dan penyuluhan.
 4. Untuk mendorong tingkat partisipasi anggota yang tinggi dalam suatu koperasi, perlu dilakukan: 1) mengadopsi suatu kegiatan fungsi tunggal koperasi; 2) keanggotaan yang homogen; dan 3) membatasi jumlah keanggotaan. Koperasi harus memberikan motivasi kepada anggotanya agar partisipasi itu efektif. Hal itu diperlukan agar pertumbuhan koperasi selalu meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan partisipasi anggota menimbulkan rasa ikut memiliki. Bagi anggota yang tidak memperoleh manfaat atau tidak terpenuhi kebutuhannya, partisipasi tidak akan efektif dan biaya yang ditanggung bila mereka ikut berpartisipasi akan semakin besar karena adanya *oportunity cost*. Sebaliknya bila manfaat atau kebutuhan anggota terpenuhi, maka partisipasi kontribusi anggota akan efektif dan biaya yang ditimbulkan relatif lebih rendah.